



**PROSIDING  
Konferensi Nasional  
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**

**Nilai Nasional Dua Daerah Dengan Histori Gerakan Separatisme:  
Studi Komparatif Aceh Dan Papua**

**Amelia Putri, Andrea Nindya Danastri, Gabriella Sinta Riwut, Hanna Exaudia  
Ekasyahputri, Khadijah, Eko Aditiya Meinarno**

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia  
amelia.putri81@ui.ac.id

**Abstrak**

Berangkat dari pendekatan latar belakang historis, etnis Aceh dan etnis Papua diketahui memiliki sejarah gerakan separatisme. Etnis Aceh dengan histori Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sedangkan etnis Papua dengan histori Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini menimbulkan dugaan adanya penurunan nilai nasional di Indonesia. Meski pergerakan tersebut telah dimulai sejak kurang lebih setengah abad yang lalu, penelitian ini ingin menelisik dan membandingkan sejauh mana orang-orang dari etnis Aceh dan Papua pada hari ini, yang direpresentasikan oleh kelompok dewasa muda, berpegang teguh terhadap nilai nasional yang tercermin dari nilai-nilai Pancasila. Dengan persamaan historis tersebut, peneliti menduga tidak adanya perbedaan nilai nasional yang signifikan antara etnis Aceh dan etnis Papua. Desain penelitian komparatif ini melibatkan total 63 partisipan yang terdiri dari 32 partisipan dari etnis Aceh dan 31 partisipan dari etnis Papua berusia 18-25 tahun. Peneliti juga menambahkan karakteristik khusus dari partisipan, yaitu setidaknya memiliki ayah yang berasal dari etnis Papua atau etnis Aceh dan atau menghabiskan masa hidupnya secara dominan di wilayah Papua atau Aceh. Untuk mendapatkan partisipan dengan kriteria yang tepat, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* di mana partisipan pertama merujuk rekan atau saudaranya yang sesuai dengan kriteria peneliti sebagai calon partisipan. Dengan menggunakan alat ukur Pancasila Scale berbentuk skala likert dengan rentang dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai 6 (sangat tidak setuju), peneliti menemukan perbedaan skor rata-rata nilai nasional yang tidak signifikan antara dewasa muda etnis Aceh dan etnis Papua,  $t(63) = -0,38, p > 0,05, d = 0.09$ . Skor rata-rata yang diperoleh cukup tinggi pada kedua kelompok, yaitu di atas 5,3 dari skor maksimal 6.

**Kata kunci:** Etnis Aceh, Etnis Papua, Nilai Nasional, Pancasila, Separatisme

## **Pendahuluan**

Setiap negara di dunia memiliki ideologi yang dijadikan sebagai landasan berpikir, mengambil sikap dan tindakan, bahkan mengkonstruksi sistem-sistem internal dalam sebuah tatanan negara. Menurut Gardner dalam Latif (2011), tidak mungkin suatu bangsa menjadi besar kecuali bangsa tersebut percaya pada sesuatu yang memiliki dimensi moral guna menopang suatu peradaban yang besar.

Setelah melewati proses yang panjang, perjalanan bangsa kita telah menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia telah direkatkan dengan adanya kesepakatan bersama para *founding father* bangsa terkait ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi dijadikan petunjuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pokok-pokok Pancasila menjadi norma dan acuan kegiatan bernegara, bermasyarakat, maupun perseorangan (Gunawan, 2016). Pancasila dipercayai sebagai sebuah jalan keluar dari adanya konflik antar golongan nasionalis dan agama dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam (Shofa, 2016).

Fungsi dari nilai-nilai Pancasila, menurut Meinarno dan Mashoedi (2016), antara lain yaitu sebagai pengatur landasan konstitusi dan keterikatan hukum, sedangkan nilai-nilai instrumen Pancasila menentukan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan negara. Untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang sudah seharusnya menginternalisasikan dan mempraktikkan nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain: nilai ketuhanan (sila pertama), nilai kemanusiaan (sila kedua), nilai patriotisme (sila ketiga), nilai demokrasi (sila keempat), dan nilai keadilan sosial (sila kelima).

Meskipun keberagaman menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaan, keberagaman juga sering kali memicu permasalahan, salah satunya dalam bentuk gerakan separatisme yang berniat untuk membebaskan diri dari Indonesia. Ada dua gerakan separatisme besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, antara lain Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang muncul pada tahun 1976 dilandaskan dengan kekecewaan yang sudah lama dirasakan oleh masyarakat Aceh karena dirasa pemerintah Indonesia membawa mereka ke dalam kerugian. Hubungan yang kurang harmonis antara Aceh dan pemerintah pusat juga menjadi masalah yang menyebabkan bagi hasil yang sangat merugikan masyarakat Aceh dan membuat konflik di Aceh semakin pelik. Menurut Fahmi dan Danial (2018), rendahnya nilai nasionalisme masyarakat Aceh terutama bagian Barat Daya diakibatkan masyarakat Aceh menilai negara tidak adil sehingga masyarakat mulai apatis terhadap persatuan Indonesia.

Sementara itu, di sisi timur Indonesia pernah muncul pula gerakan separatis bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah didirikan sejak 1965. Dikutip dari Hakim (2010), Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebetulnya nama atau sebutan yang merujuk kepada setiap organisasi atau fraksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. OPM mengawali pergerakan 'di bawah tanah' untuk membangun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, secara politik dan juga secara fisik bersenjata yang bertujuan untuk memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Menurut Djopari (2003), tindakan OPM dianggap sebagai usaha pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat sehingga gerakan separatisme bersenjata dianggap mengancam kedaulatan NKRI dan menggoyahkan semangat nasionalisme.

## **Kajian Literatur**

### **Definisi Nilai Nasional**

Nilai nasional di Indonesia diukur dari seberapa dalam internalisasi nilai Pancasila dalam diri setiap masyarakat dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila dilandasi oleh lima dimensi nilai sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan jumlah sila pada Pancasila, yaitu: nilai religio-toleransi, kemanusiaan, patriotisme-persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Meinarno & Suwartono, 2011).

Pertama, dimensi religio-toleransi adalah semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kebebasan dalam mengimani Tuhan. Semangat tersebut tercermin pada sikap hormat kepada kebebasan setiap individu untuk memilih dan menganut caranya sendiri dalam mengimani Tuhan (Tanamal & Siagian, 2020). Kedua, dimensi kemanusiaan menekankan pada perlakuan seseorang terhadap individu atau masyarakat lain yang dapat dilihat melalui perilaku saling menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu bersikap adil dalam memperlakukan orang lain, tanpa melihat latar belakang suku, ras, ataupun perbedaan lain (Meinarno & Mashoedi, 2016). Ketiga, dimensi patriotisme-persatuan merupakan nilai terlihat yang dicerminkan dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional yang diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat di Indonesia yang beragam suku, bahasa, atau agama (Meinarno & Mashoedi, 2016). Keempat, dimensi demokrasi disederhanakan dan dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ (Zuhro, 2019). Terakhir, dimensi keadilan sosial terlihat pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan di sekitarnya (Wahyudi et al., 2017).

### **Definisi Kelompok Etnis**

Indonesia tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik atau beragam yang dapat menjadi percikan api yang potensial yang dapat memicu berbagai konflik sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa (Yudhanti, 2016). Dua etnis besar di Indonesia yang pernah mengalami konflik disintegrasi atau separatisme bangsa adalah etnis Aceh dan etnis Papua.

#### *Etnis Aceh*

Etnis Aceh adalah salah satu etnis terbesar yang mendiami daerah Aceh dan keturunannya yang tinggal di daerah lain merupakan hasil percampuran beberapa bangsa pendatang, yaitu Arab, India, Parsi, Turki dengan beberapa suku asli di Sumatera, yaitu suku Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Jawa dan lain-lain (Fahmi, 2018). Sebagian besar suku Aceh yang beragama Islam mempercayai bahwa perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap aturan tidak hanya memberikan dampak yang negatif bagi individu yang melakukan, namun juga memberikan dampak negatif terhadap keharmonian dan integritas keseluruhan komunitas (Kloos, 2016). Suku Aceh sendiri dikenal sebagai pejuang dengan karakternya yang paling menonjol, yaitu rela berkorban, berjuang

dan berperang sampai titik darah penghabisan (Somperpes, 2009). Selain itu, menurut Somperpes (2009), sikap lain yang menonjol adalah setia dan patuh pada pemimpin.

Aceh memiliki sejarah yang panjang, salah satunya adalah konflik berkepanjangan antara Aceh dan pemerintah Indonesia. Konflik ini diperparah yang dengan pemerintah pusat melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas alam di Aceh Utara dan tidak adanya pemerataan yang menyebabkan masyarakat Aceh mengalami kemiskinan terus menerus. Akibatnya pada 4 Desember 1976 berdiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertujuan memisahkan Aceh dari wilayah Indonesia dan menegakkan kembali Aceh Merdeka sebagai negara penerus kejayaan kerajaan Aceh. Menurut Sari et al. (2019), eksistensi GAM dipengaruhi oleh ideologi etnonasionalisme yang tertanam dalam jiwa para pemimpin, partisipan, dan pengikut GAM. Ideologi tersebut berimplikasi pada loyalitas yang tinggi dan dicirikan oleh kesukarelaan mendukung GAM dengan cara apapun. Adanya konflik yang berkepanjangan ini dapat berdampak kepada penurunan nilai-nilai nasionalisme di tingkat lokal (Fahmi, 2018). Oleh karena itu, muncul pertanyaan besar tentang keberadaan ideologi etnonasionalisme saat ini. Apakah ideologi ini masih mengakar dan ditularkan kepada anak-anak pemimpin GAM atau apakah ideologi tersebut hilang dengan bubar nya GAM.

#### *Etnis Papua*

Orang asli Papua adalah orang yang mendiami Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dengan jumlah suku yang mendiami Tanah Papua adalah 250 suku bangsa (Rumansara, 2015). Integrasi Papua sebagai bagian dari NKRI memiliki sejarah yang cukup unik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini berawal dari masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ketika terjadinya perselisihan tentang penguasaan wilayah Papua Barat, yang dipandang Belanda sebagai koloni terpisah dari Indonesia, dan menyebabkan penundaan kemerdekaan Papua Barat di bawah kekuasaan Belanda sementara Indonesia didekolonialisasi. Belanda bersikeras mempertahankan Papua Barat dengan mengklaim bahwa orang Papua memiliki karakteristik ras yang berbeda dari mayoritas orang Indonesia. Belanda pun tidak menyerahkan kedaulatan ke jejak koloninya di Papua Barat hingga bulan Desember 1949 (Viartasiwi, 2018).

Sejak tahun 1965, dikutip dari Kaisiepo dalam Bölling dan Johansson (2006), muncul sebuah pergerakan pembebasan yang disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pemerintah Indonesia dan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki situasi di Papua Barat. Setelah berada dalam ketidakpuasan dengan perkembangan politik di pertengahan 1960-an, tujuan OPM saat ini tetap kemerdekaan penuh setelah pemerintah Indonesia menyelenggarakan referendum "*Act of Free Choice*" pada tahun 1969 dan semua tetua suku memilih untuk berintegrasi dengan negara Indonesia. Akan tetapi, banyak orang Papua mengklaim bahwa hal ini dijalankan di bawah ancaman. Meskipun OPM hanyalah satu dari banyak kelompok yang mengkritik pemerintahan Indonesia yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (Bideman & Munro, 2018) bagi banyak orang Papua, OPM lebih merupakan ideologi dan cara berpikir dan hidup yang mengakar pada setiap orang Papua.

#### **Hubungan Nilai Nasional dengan Kelompok Etnis**

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Fahmi dan Danial (2018) menemukan bahwa rendahnya nilai nasionalisme masyarakat Aceh terutama bagian Barat Daya diakibatkan oleh penilaian masyarakat Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak adil sehingga masyarakat mulai apatis terhadap persatuan. Hal ini sejalan dengan penemuan Kemenag (2019) yang menyatakan bahwa skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Aceh berada di posisi terendah di bawah rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional. Orang Aceh menganggap apabila seseorang yang berbuat dosa atau melanggar peraturan memberikan dampak pada seluruh komunitasnya, bukan hanya berdampak pada diri sendiri (Kloos, 2016). Hal ini menunjukkan budaya orang Aceh konsisten dengan sub nilai dari sila ketiga Pancasila, yaitu *citizenship* yang merupakan rasa memiliki pendirian yang kuat terhadap tanggung jawab.

Sementara itu, Papua Barat yang sama-sama pernah mengalami konflik serupa, menempati posisi tertinggi di atas rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional. Meskipun begitu, Indeks Kerukunan Umat Beragama hanya termasuk ke dalam dimensi religio-toleransi dan kemanusiaan dan tidak termasuk ketiga dimensi lainnya apabila berkiblat pada dimensi Pancasila. Etnis Papua memegang erat nilai ketuhanan yang dapat dilihat dari bagaimana orang Papua merefleksikan sejarah mereka, hubungan mereka dengan orang non-Papua, kondisi dan proyek politik saat ini, dan sebagainya, mereka sering menggunakan simbol dan narasi yang berakar pada tradisi agama terutama agama Kristen (Slama & Munro, 2015).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, muncul pertanyaan apakah ada perbedaan tingkat nilai nasional antara etnis Aceh dan Papua pada dewasa ini. Peneliti berhipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat nilai nasional antara etnis Aceh dan Papua dikarenakan keduanya sama-sama memiliki catatan sejarah terkait pergerakan separatisme sebagai usaha melepaskan diri dari Indonesia. Studi ini ingin menelisik apakah catatan sejarah tersebut memengaruhi nilai nasional hingga pada generasi dewasa muda Aceh dan Papua pada hari ini.

## Metodologi

### Partisipan

Karakteristik partisipan yang diikutsertakan dalam penelitian ini, yaitu dewasa muda berusia 18-25 tahun yang berasal dari etnis Aceh atau Papua (setidaknya anak dari ayah yang beretnis Aceh atau Papua) dan/atau secara dominan menghabiskan masa hidupnya di Papua atau Aceh. Total partisipan yang didapat sebanyak 63 partisipan dengan 32 partisipan dari etnis Aceh dan 31 partisipan dari etnis Papua. Teknik *sampling* yang digunakan peneliti, yaitu *snowball sampling*, di mana partisipan pertama merujuk rekan atau saudaranya yang sesuai dengan kriteria peneliti sebagai calon partisipan.

### Desain Penelitian

Peneliti melakukan penelitian *two groups between-subject design*, dengan studi komparatif untuk melihat nilai nasional antara kelompok dengan etnis Aceh dan etnis Papua. Teknik yang digunakan untuk mengontrol *extraneous variable* adalah konstansi berdasarkan usia, jenis kelamin, serta kelompok etnis.

## Alat Ukur

Untuk mengukur nilai nasionalis, peneliti menggunakan pengembangan *Pancasila Scale* oleh Meinarno dan Suwartono (2011) yang berisi 25 item berbentuk skala likert 6 poin (poin 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga poin 6 sangat setuju) yang didasarkan pada lima sila pancasila. Item nomor 1-5 merepresentasikan dimensi religio-toleransi. Item nomor 6-9 merepresentasikan dimensi kemanusiaan. Item 10-14 merepresentasikan dimensi patriotisme-persatuan. Dimensi demokrasi direpresentasikan pada item nomor 15-19. Terakhir, item nomor 20-25 merepresentasikan dimensi keadilan sosial. Pada *Pancasila Scale* semua item *favorable*, dalam arti lain tidak diperlukan *reverse scoring*.

## Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner berupa *google form* kepada kelompok partisipan. Pada *google form* tersebut, terdapat halaman atau lembar *informed consent*, yang kemudian diikuti dengan Pancasila Scale. Untuk meningkatkan keinginan berpartisipasi, peneliti menggunakan *reward* berupa saldo uang elektronik senilai Rp20.000,00 untuk masing-masing 5 orang yang dipilih dengan mengundi nomor telepon yang ditulis partisipan (bersifat *optional*). Setelah data diperoleh, dilakukan analisis statistik dan diinterpretasi. Pengundian nomor telepon akan dilakukan setelah data terkumpul dan selesai dianalisis.

## Analisis Statistik

Teknis analisis statistik yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis penelitian adalah teknik analisis statistik *independent-measures t-test* dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 23. Teknik tersebut digunakan karena desain penelitian melibatkan dua sampel yang terpisah dan independen dengan grup pertama adalah kelompok etnis Aceh serta grup kedua adalah kelompok etnis Papua.

## Hasil dan Diskusi

### Hasil Perhitungan *Independent Sample t-Test*

Dewasa muda dari etnis Papua menunjukkan nilai nasional yang lebih tinggi ( $n = 31, M = 5,38, SD = 0,328$ ) daripada dewasa muda etnis Aceh ( $n = 32, M = 5,34, SD = 0,453$ ). Namun, ditemukan perbedaan rata-rata nilai nasional yang tidak signifikan antara etnis Aceh dan Papua,  $t(63) = -0,38, p > 0,05, d = 0,09$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang berarti antara nilai nasional etnis Aceh dan etnis Papua.

### Pembahasan Nilai Nasional dan Histori Gerakan Separatisme

Hasil yang ditemukan peneliti menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai nasional etnis Aceh dan etnis Papua yang direpresentasikan oleh kelompok dewasa muda. Hal ini tidak sesuai indeks kerukunan umat beragama dengan penelitian yang dilakukan Kemenag (2019). Pada penelitian tersebut terlihat bahwa Papua dan Aceh memiliki perbedaan yang ekstrim dan signifikan. Perbedaan ini terjadi karena penelitian oleh Kemenag (2019). Adanya ketidaksesuaian hasil ini barangkali dikarenakan pada survei yang dilakukan Kemenag hanya

menguji satu dimensi yang spesifik, yaitu dimensi religio-toleransi saja. Setelah peneliti melakukan pengukuran nilai nasional dengan dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup empat dimensi lainnya, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan.

### **Nilai Nasional**

Penelitian ini berangkat dari kemiripan latar belakang historis. Aceh dan Papua diketahui telah memiliki kemiripan sejarah historis tentang pergerakan separatisme dengan Indonesia. Dari kemiripan tersebut, peneliti telah memprediksikan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai nasional yang signifikan antara dewasa muda etnis Aceh dengan dewasa muda etnis Papua sehingga hipotesis awal peneliti terbukti. Di samping itu, peneliti juga menemukan hal lain yang menarik dari penelitian ini. Meski gerakan separatisme menurut Djopari (2003) dianggap telah mengganggu semangat nasionalisme, hal tersebut memang sudah terjadi beberapa dekade yang lalu dan tidak mempengaruhi nilai nasional pada generasi-generasi selanjutnya. Hal tersebut terbukti skor rata-rata yang cukup tinggi pada kedua kelompok, yaitu di atas 5,3 dari skor maksimal 6. Padahal, hampir seluruh partisipan yang terlibat dalam penelitian ini secara dominan telah menghabiskan hidupnya di daerah asal etnis, sehingga kami telah melibatkan target yang tepat untuk representasi pengujian nilai nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski kedua kelompok memiliki sejarah pergerakan separatisme mengupayakan pemisahan diri dari Indonesia, penulis tidak hal tersebut sebagai hal yang mengganggu nilai-nilai nasional yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari.

### **Gerakan Separatisme**

Jika menelisik kedua pergerakan separatis ini dari latar belakangnya, menurut Rabasa dan Chalk (2001), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap aturan pemerintah pusat, termasuk dominasi pemerintah provinsi oleh pihak luar, mengabaikan budaya lokal, dan eksploitasi sumber daya alam provinsi di bawah syarat-syarat yang tidak menguntungkan penduduk lokal. Sedangkan untuk kasus Aceh, dua faktor utama yang membangkitkan gerakan separatisnya antara lain pertanyaan berkelanjutan tentang eksploitasi ekonomi dan akses militer yang dirasakan (Rabasa & Chalk, 2001). Sehingga solusi pemberian undang-undang desentralisasi bukanlah solusi terbaik karena dianggap masih gagal dalam menangani permasalahan mendasar yang memicu konflik. Mereka menunjukkan bahwa menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah tidak banyak memperbaiki ketidakadilan mendasar ketika pelanggaran HAM berat dan eksploitasi ekonomi terus berjalan selama beberapa dekade (McGibbon, 2004). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari gerakan separatisme bukanlah karena masyarakat kedua etnis dalam studi ini tidak setuju pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, melainkan adanya hubungan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berujung pada konflik politik dan memicu keinginan untuk membebaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Tabel 1. Statistik Demografis Partisipan**

Etnis	Jenis Kelamin	n	%
Aceh	Laki-laki	20	31.7
	Perempuan	12	19
Papua	Laki-laki	15	23.8
	Perempuan	16	25.4

**Tabel 2. Output *Independent Measure t-Test***

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Usia	63	18	25	20.19	1.435
Jenis Kelamin	63	1	2	1.44	.501
Etnis	63	1	2	1.49	.504
Valid N	63				

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai nasional yang signifikan pada dewasa muda dari etnis Papua dan Aceh, meski dewasa muda dari etnis Papua menunjukkan tingkat nilai nasional yang lebih tinggi daripada dewasa muda dari etnis Aceh. Hasil penelitian ini dapat menjadi penjelasan bahwa adanya gerakan separatisme bukan disebabkan karena individu pada etnis tertentu tidak setuju atau menentang nilai yang terkandung dalam butir Pancasila, namun peneliti menduga bahwa hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan atau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bisa menjadi alasannya. Adapun dalam proses pengambilan data dan penelitian, peneliti telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi terlibatnya *extraneous variables* antara lain dengan menggunakan konstansi usia yang direpresentasikan oleh kelompok dewasa muda berusia 18-25 tahun dan harus merupakan orang asli dari etnis tersebut yaitu setidaknya memiliki ayah yang mengidentifikasi sebagai bagian dari etnis dan/atau menghabiskan lebih banyak waktu di tanah etnis selama hidupnya. Dengan demikian penelitian ini sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan validitas penelitian. Dengan adanya hasil studi ini, diharapkan dapat memicu penelitian selanjutnya mengenai topik yang serupa mengingat dalam hemat peneliti jarang sekali topik dan kelompok partisipan yang serupa diteliti di Indonesia.

## Referensi

- Biderman, T., & Munro, J. (2018). Facts, feasts, and forests: considering truth and reconciliation in Tanah Papua.
- Bölling, J., & Johansson, A. (2006). On the Transnational Interaction Between Nationalist and Cosmopolitan Actors-The West Papua Example.
- Djopari, J. R. (2003). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo. Retrieved November 16, 2020, from [https://books.google.co.id/books/about/Pemberontakan\\_Organisasi\\_Papua\\_Merdeka.html?id=WGI0AAAAMAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pemberontakan_Organisasi_Papua_Merdeka.html?id=WGI0AAAAMAAJ&redir_esc=y)
- Fahmi, R. (2018). Revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat aceh barat daya: Studi kasus di kabupaten aceh barat daya. [Bachelor thesis, Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository Indonesia University of Education. <http://repository.upi.edu/id/eprint/35229>
- Gunawan, I. (2016). Perspectives of Pancasila: Leadership Education's Values and Ethics'. *2nd ICET Theme: "Improving the Quality of Education and Training Through Strengthening Networking, 417*.
- Hakim, M. F., (2010), Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984, Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kloos, D. (2016). Sinning and ethical improvement in contemporary Aceh. In *Islam and the Limits of the State* (pp. 56-86). Brill.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Meinarno, E. A., & Mashoedi, S. F. F. (2016). Pembuktian kekuatan hubungan antara nilai-nilai pancasila dengan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(1), 12-22.
- McGibbon, R. (2004). *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?*. (Rep.) (Alagappa M., Ed.). East-West Center. Retrieved March 31, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/resrep06526>
- Sari, C. M. A., Hasan, H., Syahbandir, M., & Efendi, E. (2019). The internalisation process and pattern on ideology ethnonationalism from five leaders of the Free Aceh Movement to their children. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7*(8), 90-104.

- Shofa, A. M. I. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34-40.
- Slama, M., & Munro, J. (2015). *From 'stone-age' to 'real-time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. ANU Press.
- Rabasa, A., & Chalk, P. (2001). THE CHALLENGE OF SEPARATISM AND ETHNIC AND RELIGIOUS CONFLICT. In *Indonesia's Transformation and the Stability of Southeast Asia* (pp. 27-46). Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA: RAND Corporation. Retrieved March 31, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1344af.13>
- Rumansara, E. H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan Yang Manusiawi di Tanah Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 1(1). Somerpes. (2019, September 25). *Siapakah Orang Aceh?*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/krisdasomerpes/54ff014da333118c4e50f9c1/siapakah-orang-aceh>
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(1), 35-48.
- Viartasiwi, N. (2018). The politics of history in West Papua-Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141-159.
- Wahyudi, J., Milla, M. N., & Muluk, H. (2017). Persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor kepercayaan politik pada mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(1), 59-71.
- Yudhanti, R. (2016). Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual. *Law Research Review Quarterly*, 2, 599-610.
- Zuhro, R.S. (2019). Demokrasi dan Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16, 69-81.

